



TUGAS AKHIR

ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YEYEN AULIASARI

NIM. 01770623217

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : YEYEN AULIASARI
 NIM : 01770623217
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 JUDUL : ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR
 PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 06 Mei 2020

Disetujui Oleh:
PEMBIMBING

Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
NIP. 19751129 2000801 1 009

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002



Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YEYEN AULIASARI
NIM : 01770623217
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAAN
TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 20 MEI 2020

Disetujui Oleh:

PANITIA PENGUJI
KETUA



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

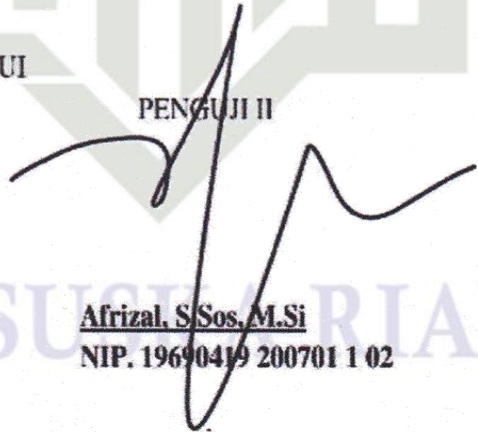
MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP. 19760426 200701 1 016

PENGUJI II



Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 19690419 200701 1 02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ABSTRAK

ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:
Yeyen Auliasari

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di JL. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara dengan Kabid Pajak Daerah. Data sekunder yaitu merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019 serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, realisasi peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sejak tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau adalah dari tingkat kepatuhan para wajib pajak (WP), Program informasi, luas areal pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, jumlah volume air yang dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Riau mengalami kendala dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Air Permukaan diantaranya belum semua wajib pajak menggunakan alat meteran yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Upaya yang terus dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan regulasi kepada wajib pajak serta melakukan uji petik terhadap wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, Faktor, Kendala dan Upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Peningkatan Pajak Air Permukaan Tahun 2017-2019 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Terwujudnya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Supartono serta Ibunda Nurhayati Br. Manurung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk selalu semangat berjuang untuk mewujudkan impian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan- kebijakannya.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan Administrasi Perpajakan.
6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
8. Kepada segenap jajaran staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Kepada Sahabat saya Pratini Darisman selaku orang yang sangat memotivasi saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Kepada sahabat saya Maya Oktaria, Mugi handayani, Indah Hermis, Sherly Leonita, Sintia pebrilisa dan Hasri Lestari selaku orang-orang yang memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk teman-teman di kelas B yang telah mewarnai hari-hari penulis dikelas dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Serta semua orang yang datang dan pergi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pekanbaru, Mei 2020

Yeyen Auliasari

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN	
DAERAH PROVINSI RIAU	
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi	
Riau.....	10
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	11
2.3 Struktur Organisasi	13
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK	
3.1 Tinjauan Teori.....	32
3.1.1 Pengertian Pajak	32
3.1.2 Fungsi Pajak	34
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	35
3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	36
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	38
3.1.6 Pengertian Pajak Daerah.....	38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7	Jenis-Jenis Pajak Daerah	38
3.1.8	Pajak Air Permukaan.....	41
3.1.9	Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam.	47
3.2	Tinjauan Praktek	50
3.2.1	Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017-2019 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	50
3.2.2	Kendala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Pajak Air Permukaan	53
3.2.3	Upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Pajak Air Permukaan	56
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran	61

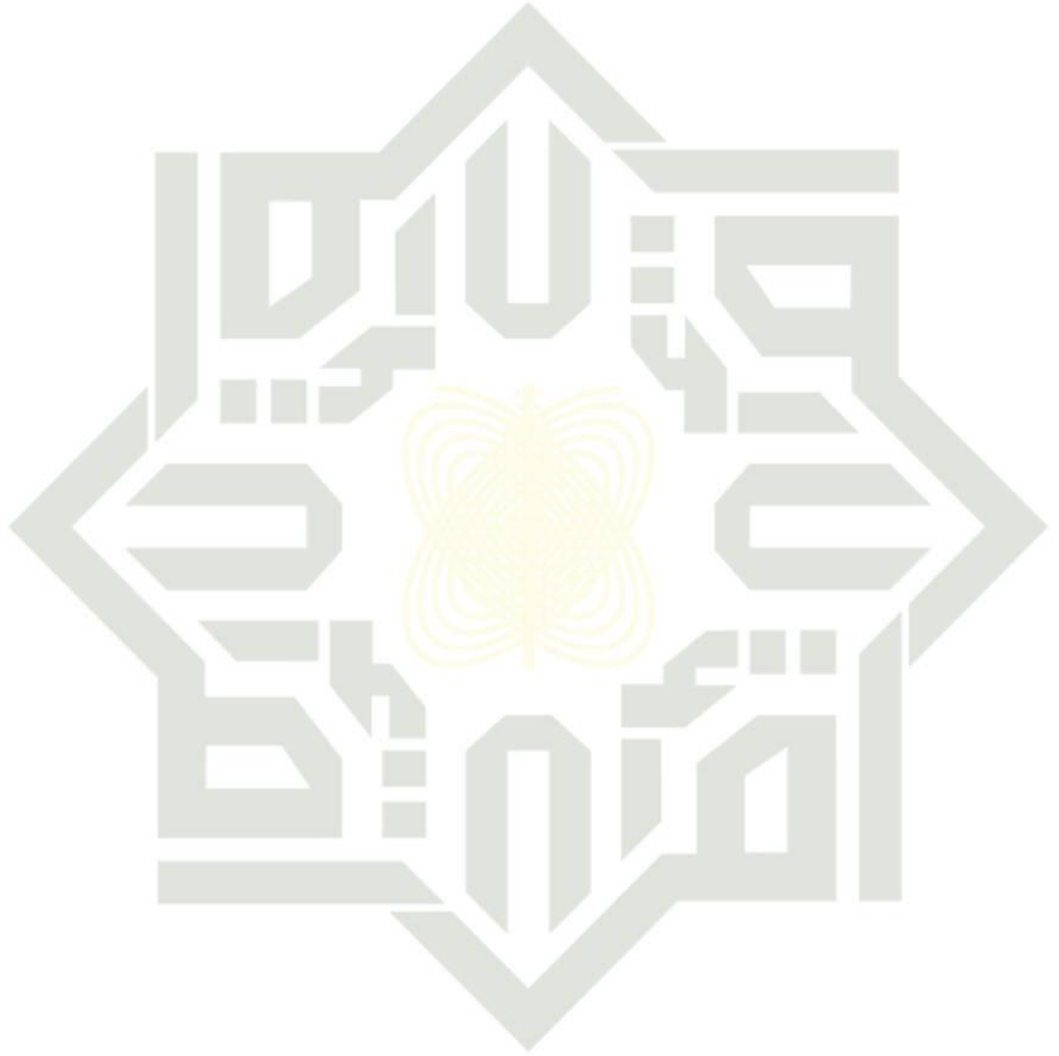
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.I Realisasi, Kubikasi dan Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017-2019 3



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

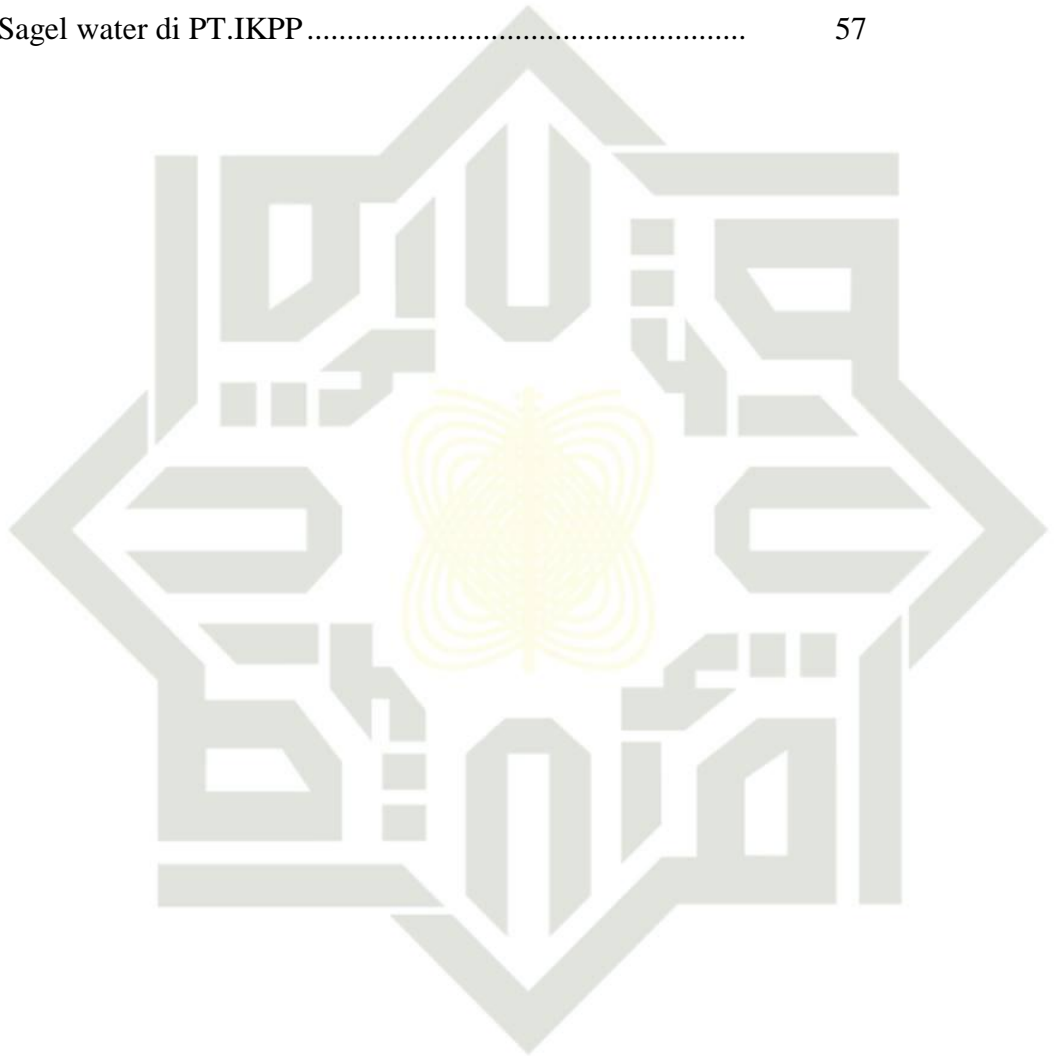
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau..... 13

Gambar III.2 Sosialisasi dan Regulasi wajib pajak terhadap pemasangan Sagel water di PT.IKPP 57



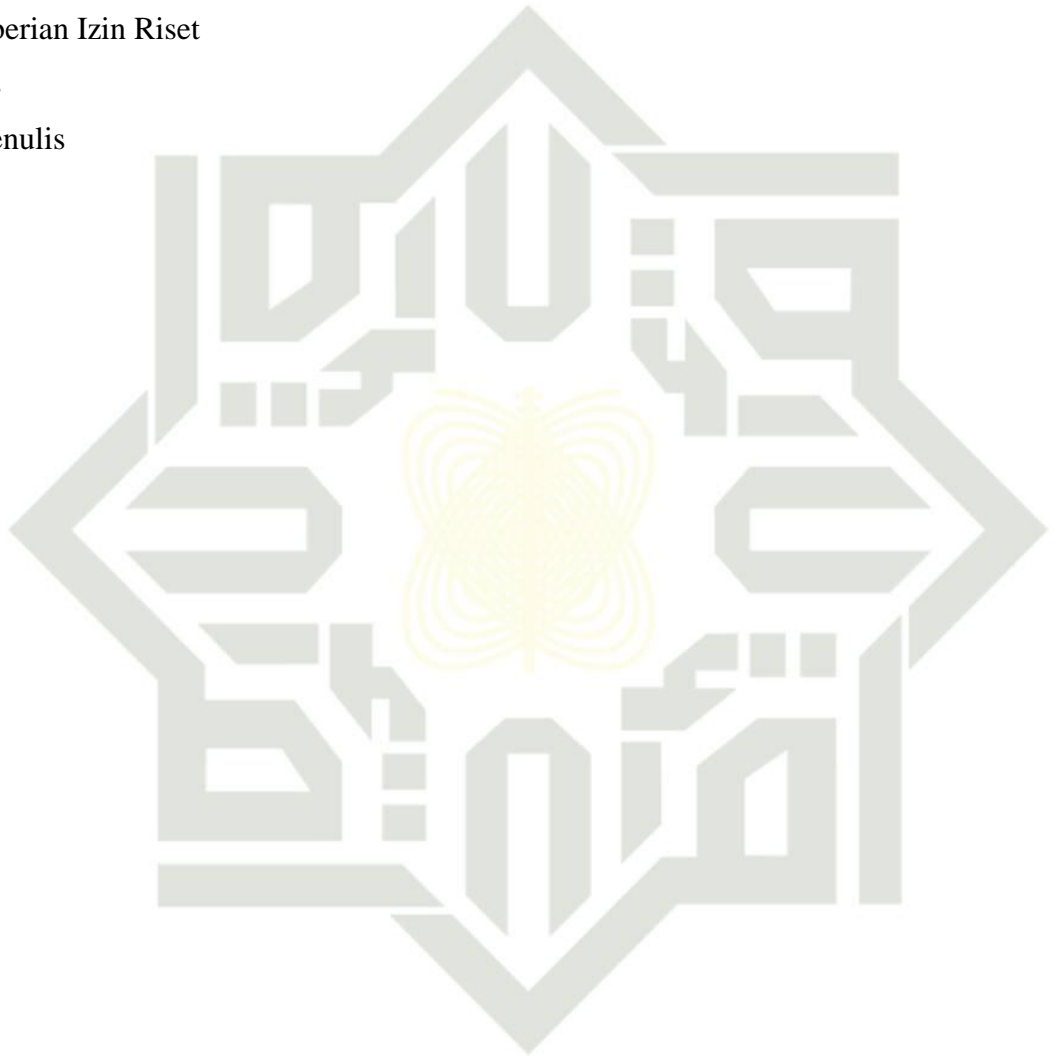
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Pertanyaan Wawancara
- Surat Bimbingan Laporan Penelitian
- Surat Izin Penelitian
- Surat Pemberian Izin Riset
- Nota Dinas
- Biografi Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sumber utama pendapatannya ada pada sektor pajak. Seiring dengan menipisnya sumber daya alam minyak bumi dan gas alam menyebabkan penerimaan pendapatan Nasional dari sektor migas semakin berkurang. Penurunan pendapatan pada sektor migas menjadikan sektor pajak sebagai pendapatan utama Nasional. Pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlah pendapatannya yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah Negara. Tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Hingga saat ini belum ada sumber pendapatan selain pajak yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan utama negara.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat serta pemahaman hak dan kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PKP) dan Pajak Rokok.

Diantara Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, Pajak Air Permukaan. UU No 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana Pajak Air Permukaan dapat ditafsirkan sebagai pihak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Sedangkan pengertian Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Untuk Provinsi Riau Pajak Air Permukaan tersebut dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berkedudukan di ibukota provinsi. Untuk kemudahan dalam pelayanan dibentuklah Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang berada di Ibukota Kabupaten dan beberapa kecamatan sebagai perpanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau cukup besar mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan dan industri yang memanfaatkan air permukaan dengan skala besar. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau, hal ini dapat kita lihat dari data target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau pada setiap tahunnya yaitu tahun 2017-2019.

Dari data yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan dapat dilihat dari pencapaian target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagaimana terlihat dari gambar dalam tabel I.I berikut ini:

Tabel III.1
Realisasi, Kubikasi dan Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah WP	Target	Kubikasi (M3)	Realisasi	%
2017	336	Rp40.298.089.481	Rp795.573.379	Rp27.379.086.879	67,94%
2018	341	Rp65.298.089.481	Rp558.262.327	Rp28.957.476.717	44,35%
2019	352	Rp30.438.711.395	Rp596.335.268	Rp32.084.021.222	105,41%
Rata-rata					72,56%

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel I.I dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019 dinilai tidak efektif hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diantaranya yaitu belum semua wajib pajak (WP) melaksanakan atau menggunakan alat ukur meteran sesuai dengan yang ditetapkan. Tabel I.1 menunjukkan tingkat penerimaan paling tinggi adalah pada tahun 2019 dengan persentase 105,41%, sedangkan tingkat penerimaan paling rendah ditunjukkan pada tahun 2018 dengan jumlah persentase

sebesar 44,35%.Terjadinya peningkatan pada tahun 2019 yaitu dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya yaitu sebanyak 352 lebih banyak dari tahun sebelumnya, serta target yang ditetapkan oleh pemerintah berhasil dicapai yaitu sebesar 105,41%. Pada bab pembahasan nantinya akan dijelaskan secara rinci mengenai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Air Permukaan.

Beberapa upaya terus dilakukan oleh Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan diantaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi berupa pemahaman tentang kewajiban membayar Pajak Air Permukaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

Faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau adalah dari tingkat kepatuhan para Wajib Pajak (WP), Program informasi, luas areal pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, jumlah volume air yang dimanfaatkan. Dari faktor itulah yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak air permukaan jika maksimal maka tercapailah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan penerimaan dari pada Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penerimaan dari pada Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi untuk mengetahui peningkatan Pajak Air Permukaan pada tahun 2017-2019 di Provinsi Riau.
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya dibidang perpajakan.
3. Memberi masukan-masukan bagi instansi terkait dan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi.

Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dihitung dari bulan Januari 2020 sampai Mei 2020.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara dengan Kabid Pajak Daerah. Dan juga menggunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data penerimaan

berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data-data yang diperlukan untuk pembahasan penelitian.

e. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data secara deskriptif, yaitu dengan mengolah atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan membandingkan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengurai dan membahas secara ringkas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan dekripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Pajak, Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan, Objek Pajak Air Permukaan, Subjek Pajak Air Permukaan, Dasar Hukum Dan Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan, Tarif Pajak Air Permukaan, Perhitungan Pajak Air Permukaan, Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak, Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak, Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam, Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2017-2019, Kendala dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017-2019 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran mengenai tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN****DAERAH PROVINSI RIAU****2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39- 29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I dengan surat keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 37/11/1982 tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat.
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Berkedudukan di Tembilahan.
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru.

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**A. Visi**

Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

B. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.
4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis dibidang
Pendapatan Daerah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang di pimpin oleh Drs. H. Indra Putrayana, M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:

- A. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian perencanaan program
 - b. Subbagian keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah
 - c. Subbagian kepegawaian dan umum
- B. Bidang Pajak daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor
 - b. Subbidang penerimaan pajak daerah lainnya
 - c. Subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah
- C. Bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dan bagi hasil terdiri dari:
 - a. Subbidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya
 - b. Subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak
 - c. Subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak
- D. Bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan terdiri dari:
 - a. Subbidang pengembangan sistem informasi
 - b. Subbidang pengembangan pendapatan
 - c. Subbidang pengolahan data pendapatan
- E. Bidang Pembukuan, pengawasan dan pembinaan terdiri dari:
 - a. Subbidang pembukuan dan pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Subbidang pengawasan dan penerimaan daerah
 - c. Subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan
- F. Unit pelayanan teknis (UPT)

Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan program

Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.
- b. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.
- c. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.

- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah.
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban dan pencatatan aset.
- l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi,fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Subbidang penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:SS

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- e. Menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- g. Melakukan evaluasi terhadap prealisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala.
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk

peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya.
- e. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
- f. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
 - h. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
 - i. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
 - j. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
 - k. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.
 - l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 8. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah**
- Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

- c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota.
- e. Menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah.
- f. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- c. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- d. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- e. Melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- f. Menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
- c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak.
- e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah.
- f. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- f. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepala Subbidang Pengembangan sistem Informasi

Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
- c. Melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- d. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- e. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- f. Menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- g. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- i. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan.
- j. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- k. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- l. Melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- m. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- n. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan.
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan.
- c. Melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
- e. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah.
- f. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
- c. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis.

- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan.
- e. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan.
- f. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- g. Menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

18. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
- c. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- d. Melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern.
- e. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengawasandan Penerimaan Daerah.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

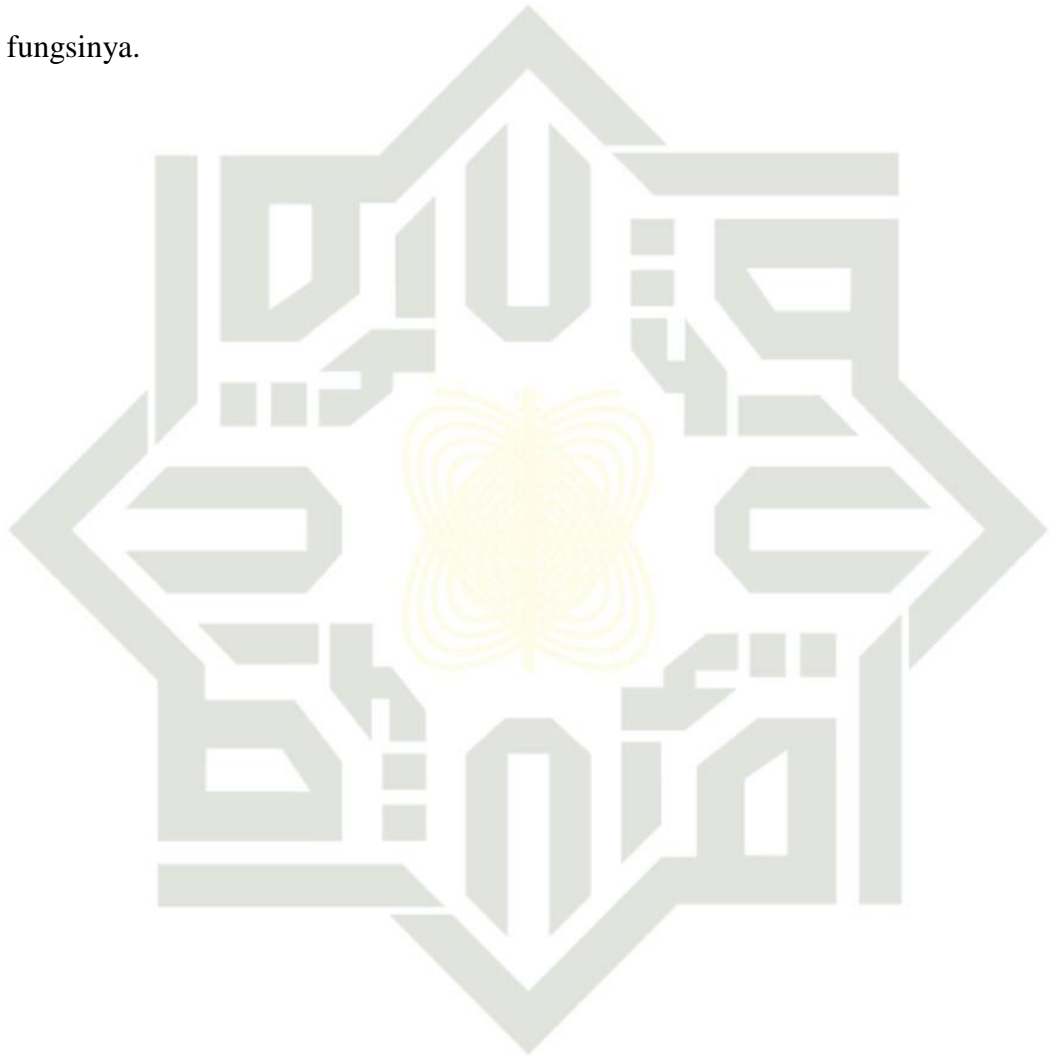
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasandan Penerimaan Daerah, dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

20. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- c. Memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal.
- d. Melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala.
- e. Memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan.

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau adalah dari tingkat kepatuhan para wajib pajak (WP), Program informasi, luas areal pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, jumlah volume air yang dimanfaatkan. Dari faktor itulah yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak air permukaan jika maksimal maka tercapailah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017-2019 selain mengalami penurunan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu terjadi pada tahun 2019, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,3 Milyar dari tahun sebelumnya. Pajak Air Permukaan rata-rata pada tahun 2017-2019 adalah sebesar 72,56%.
2. Kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, adanya tunggakan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang menyebabkan penerimaan Pajak Air Permukaan berkurang, dan penggunaan meteran air yang belum ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi berupa pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya menaati peraturan yang sudah ditetapkan, dalam izin pengambilan pemanfaatan air permukaan menggunakan alat ukur meter yang telah ditetapkan, mencari sumber-sumber potensi baru yang menjadi pemasukan pajak air permukaan serta menyampaikan SKPD ke Wajib Pajak dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam melakukan proses pemanfaatan air permukaan.

1.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerimaan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dinilai kurang optimal, maka peneliti menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang ada untuk lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong sebagai objek Pajak Air Permukaan, sehingga yang belum teridentifikasi dapat dikenakan pungutan sehingga penerimaan Pajak Air Permukaan menjadi lebih optimal. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga diharapkan menunjuk petugas lapangan khusus dalam hal pemungutan Pajak Air Permukaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan penggunaan meteran air terhadap pengguna air permukaan selaku Wajib Pajak Air Permukaan.

2. Peneliti menyarankan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang ada di Kabupaten/Kota di provinsi Riau untuk terus meningkatkan tingkat pelayanan termasuk menindak tegas Wajib Pajak yang belum membayar pajak air permukaan dan menunjuk petugas lapangan khusus dalam hal pemungutan Pajak Air Permukaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Andi, 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Halim, Abdul. Dara, Amin Rangga Bawono, Icuk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Apikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Affistet
- MJH Smeeths dalam. H. Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Unri Press. Pekanbaru. 2011
- Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Samudra, Aziz Azhari. 2015. *Perpajakan diIndonesia*, Cetakan ke 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sjahaan, Marihot P. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Apa saja langkah-langkah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam mengoptimalkan pendapatan Pajak Air Permukaan?

Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan?

Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan?

Apakah pendapatan Pajak Air Permukaan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta Milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.VII/PP.00.9/246/2020
Biasa

Pekanbaru, 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awwal 1441 H

Izin Penelitian


Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yeyen Auliasari
NIM. : 01770623217
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian
dengan berjudul: " Analisis Peningkatan Pajak Air Permukaan Tahun 2017-
2019 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

/Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/31068
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN KTI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.VII/PP.00.9/246/2020 Tanggal 16 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : YEYEN AULIASARI |
| 2. NIM / KTP | : 01770623217 |
| 3. Program Studi | : D 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Februari 2020



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284

Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755

Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

NOTA - DINAS

: Kasubbid Pajak Daerah
 : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
 : 26 Februari 2020
 : 071/Bapenda// 53
 : Biasa
 : -
 : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi/LTA

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2020 Tanggal 16 Januari 2020, Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, bersama ini diharapkan kepada Saudara untuk membantu memberikan data/informasi yang dibutuhkan.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : YEYEN AULIASARI
 NIM : 01770623217
 Program Studi : D 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : **ANALISIS PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2017-2019 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU.**

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI RIAU
 SEKRETARIS,

FITRA JAYA PURNAMA, ST, MT
 Pembina
 NIP.19781113 200501 1 003

08224270102

BIOGRAFI PENULIS



Yeyen Auliasari, lahir di Kota Garo, 18 Agustus 1999 yang merupakan anak pertama dari kedua bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Supartono dan Ibu Nurhayati Manurung dan mempunyai saudara yang bernama Damas Aulia Nata.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari TK Nusa Indah (2004-2005), SD Negeri 006 Kota Baru (2005-2011), SMP Negeri 5 Kota Bangun (2011-2014), MAN 1 Medan (2014-2017). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Februari-April 2020) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul : “ **Analisis Peningkatan Pajak Air Permukaan Tahun 2017-2019 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”

Pengalaman berorganisasi yang penulis lakukan selama duduk dibangku perkuliahan bermula dari organisasi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang bernama Suska Muda selama 3 bulan dan menjalankan kegiatan yang dikenal dengan Porsima (Pekan Olahraga Mahasiswa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.